

**ANALISIS PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN
(STUDI KASUS DESA TIROM KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS)****DENI**

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Kuningan, Jawa Barat
E-mail: kotak_educati@yahoo.co.id

ABSTRACT

Most of National Parks in Indonesia have their problems related to human existence in conservation area. Since its establishment, there has been a conflict between Bukit Barisan Selatan National Park (BBSNP) with the surrounding communities. In the BBSNP, there have been acts of illegal landusage where it is commonly referred as forest encroachment. Forest encroachment in Tirom village is becoming interesting to study because it needs more complicated handling compared to other villages.

This study aims to reveal the factors led to forest encroachment action by people of Tirom village, Pematang Sawa sub-district, Tanggamus District. This social research used descriptive qualitative and quantitative methods to test the legal land ownership factors and people income as factors affecting forest encroachment action. In this method, respondents were chosen purposively and interview was conducted deeply (in-depth interview) on each respondent.

Based on the results of in-depth interviews it is concluded that there are several socio-economic problems experienced by the Tirom village including low income, limited sources of livelihood, and low capacity of communities in managing small areas. Based on regression analysis results it was shown that there is no strong relationship between the act of appropriation (as seen from the encroachment of land area) with revenues and private land ownership. This study also shows that there are other factors (beside income and private land ownership factors) that led to forest encroachment by the Tirom Village communities. These other factors need to be tested through further research..

Keywords: *Encroachment, Tirom Village, Bukit Barisan Selatan National Park*

INTISARI

Taman Nasional di Indonesia sebagian besar memiliki masalah terkait keberadaan manusia. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), sejak penunjukannya selalu ada konflik dengan masyarakat di sekitarnya. Di TNBBS telah ada tindakan penggunaan lahan ilegal dimana hal ini sering disebut dengan perambahan hutan. Perambahan hutan yang terjadi di Desa Tirom menjadi menarik untuk diperhatikan karena Desa Tirom memiliki penanganan konflik yang lebih rumit dibandingkan dengan desa-desa lainnya di sekitar TNBBS.

Penelitian ini mencoba mengungkap faktor apa saja yang menyebabkan tindakan perambahan hutan oleh masyarakat Desa Tirom di Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif untuk menguji faktor kepemilikan lahan legal dan pendapatan masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi tindakan perambahan hutan. Dalam metode kualitatif, responden dipilih secara purposive dan wawancara dilakukan secara mendalam, sementara itu teknik survei dilakukan untuk menguji secara kuantitatif.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam disimpulkan adanya beberapa masalah sosial ekonomi yang dialami masyarakat Desa Tirom seperti pendapatan rendah, sedikitnya sumber penghidupan dan kurangnya kapasitas masyarakat dalam mengelola pertanian lahan sempit. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara tindakan perambahan lahan dengan pendapatan dan kepemilikan lahan pribadi. Studi ini menunjukkan juga bahwa ada faktor lain (selain faktor pendapatan dan kepemilikan lahan pribadi) yang menyebabkan perambahan hutan oleh masyarakat Desa Tirom. Faktor-faktor ini perlu dikaji dalam penelitian lebih lanjut.

Kata Kunci: Perambahan, Desa Tirom, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

PENDAHULUAN

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah kawasan konservasi terbesar ketiga di Sumatera. Pada awalnya Bukit Barisan Selatan merupakan kawasan Suaka Margasatwa yang ditetapkan pada tahun 1935 melalui *Besluit Van der Gouverneur Indie* No. 48 stbl 1935 dengan nama Sumatera Selatan I (SS I). Ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional melalui surat pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 dan melalui SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 statusnya berubah menjadi Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain kawasan darat seluas \pm 356.800 Ha, pada kawasan ini ditetapkan juga Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan seluas \pm 21.600 Ha yang masuk dalam pengelolaan TNBBS melalui SK Menhut No.71/Kpts-II/1990 tanggal 15 Februari 1990.

Seperti taman nasional lain di Indonesia, kawasan TNBBS juga tidak luput dari berbagai permasalahan. Mulai dari permasalahan kemantapan/keamanan kawasan, kelestarian sumberdaya alam hayati, maupun keterbatasan sumberdaya kelembagaan. Secara nyata, telah terjadi berbagai bentuk gangguan di lapangan, seperti perambahan (*encroachment*), penebangan liar (*illegal logging*), perburuan liar khususnya harimau, burung dan gajah khas Sumatera (*illegal poaching*), konflik satwa dengan manusia,

tata batas kawasan dan tata ruang/zonasi yang belum benar-benar mantap, dan lain-lain.

Desa Tirom Kecamatan Pematang Sawa berada pada perbatasan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Desa ini pun telah menjadi perhatian pengelola TNBBS dikarenakan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya bukanlah hal kecil yang dapat diabaikan. Bahkan Desa Tirom telah meninggalkan masalah serius dengan pengelola TNBBS sehingga hanya di desa inilah TNBBS belum berhasil melakukan rekonstruksi batas pasca perse-lisihan pada tahun 2008 tentang sengketa lahan kawasan dengan lahan margasatwa.

Kajian ini merupakan telaah untuk mengidentifikasi permasalahan yang mendasar dari konflik antara masyarakat Desa Tirom dengan pengelola TNBBS serta mencari berbagai faktor penyebab perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Tirom.

Pengelolaan taman nasional

Menurut Hermawan *et al.* (2005) sistem pengelolaan yang diterapkan di hampir seluruh kawasan konservasi di Indonesia adalah *state based management* (SBM). Dalam sejarah pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, model *state-based management* diduga kurang efektif untuk mencapai tujuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kawasan konservasi yang rusak baik oleh kegiatan

illegal logging, okupasi lahan, maupun bencana alam seperti kebakaran. Munggoro (1999) berpendapat bahwa kelemahan SBM adalah adanya keterbatasan birokrasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan standar dalam pengelolaan TN seperti : (1) keterbatasan pengetahuan, (2) keterbatasan informasi, (3) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), dan (4) buruknya kelembagaan dalam pengelolaan TN. Bien (1999) dalam Hermawan *et al.* (2005) menambahkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan ketidakefektifan SBM yaitu : (1) pilihan kelembagaan yang kurang tepat dan (2) kurangnya partisipasi masyarakat lokal. Yang dimaksud dengan pilihan kelembagaan yang kurang tepat disini adalah walaupun hutan secara *de jure* dinyatakan sebagai milik negara, pada kenyataannya secara *de facto* adalah *open-access property* bagi setiap orang. Oleh karena itu sangat dimungkinkan masyarakat lokal dan pendatang untuk menebang pohon atau bahkan mengkonversi lahan untuk pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan hal tersebut Roth (2004) dalam Hermawan *et al* (2005) berpendapat, pengelolaan taman nasional diduga akan efektif apabila mampu mengakomodasikan kepentingan parapihak tersebut. Untuk mengakomodasikan kepentingan tersebut tentu saja harus diketahui parapihak yang berkepentingan, jenis kepentingannya, dan harapan terhadap pengelolaan taman nasional (Roth 2004 dalam Taufik *et al.*, 2005).

Perambahan hutan

Menurut Suminah (2000) dalam Haryati (2002) perambahan hutan merupakan kegiatan pemanfaatan hutan secara ilegal oleh masyarakat untuk digunakan sebagai lahan usahatani atau pemukiman dan masyarakat yang melakukan perambahan hutan disebut sebagai perambah hutan. Suminah juga berpendapat bahwa perambah hutan tidak selalu bermukim di areal hutan yang dirambah, ada juga

yang tinggal di luar kawasan hutan seperti sekitar hutan atau luar kota.

Sedangkan menurut Siswono (1993) dalam Haryati (2002), definisi perambah hutan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha tani/atau mengambil hasil hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Menurut Departemen Transmigrasi dan Pemukiman (1993) dalam Haryati (2002), meng-kategorikan perambah hutan ke dalam tiga kelompok, yaitu, (1) Perambah hutan (termasuk peladang berpindah) yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa pekerjaan mereka itu merusak hutan dan melanggar hutan. (2) Penduduk yang mengetahui bahwa merambah hutan dan mengambil hasil hutan di areal hutan lindung, hutan negara dan hutan wisata itu dilarang, tetapi mereka terus melakukannya sebab mereka tidak mempunyai lahan pertanian. (3) Perambah hutan yang dengan sadar mengetahui tentang aturan/hukum yang berlaku, sebab mereka hanya mencari keuntungan pribadi semata. Pelaku dari kelompok ini akan ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau. Pelaku perambahan hutan dari kelompok pertama dan kedua dibina dan direlokasi/ditransmigrasikan ke lokasi asal atau ke tempat baru.

Tujuan pokok usaha mereka adalah menguasai lahan dalam kawasan hutan untuk menanam tanaman pertanian bernilai ekonomis (kopi, cokelat, padi, kelapa dan lada). Kerusakan luas garapan peladang berpindah akan bertambah luas dari tahun ke tahun, dengan pola kerja berkelompok sambil mempergunakan teknologi lebih maju (*chain saw*). Di sinilah, secara ekonomis tingkat ekonomi perambah hutan lebih baik dari peladang berpindah (Haryati, 2002).

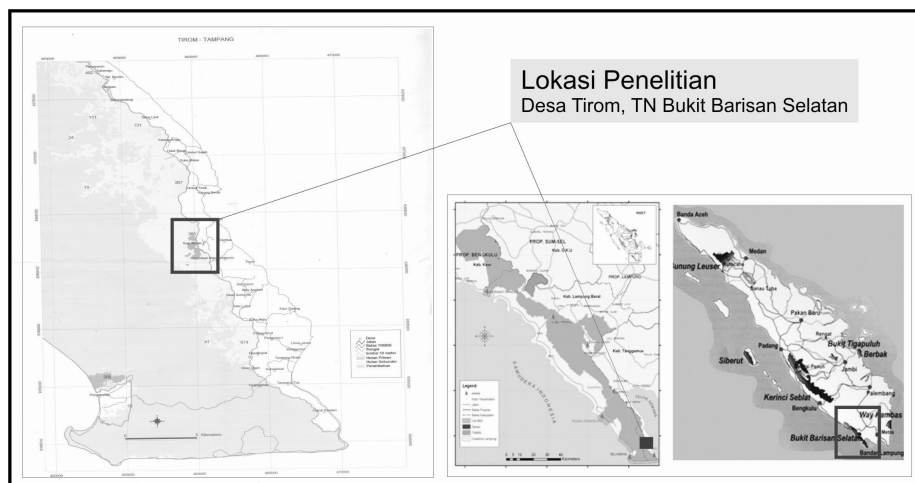
Aspek sosial, ekonomi dan budaya

Kebiasaan merambah hutan merupakan bagian dari kehidupan mereka. Untuk memahaminya, terdapat dua pola pikir di dalamnya; (1) manusia sebagai pencetus dari sebuah sistem kebudayaan, (2) kebudayaan tempat manusia hidup turut mendorongnya untuk menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berlaku, sekaligus memotivasi pola perilaku manusia yang hidup dalam kelompok ini. Kita dapat mengerti dari cara berpikir semacam ini, bahwa manusia harus berusaha agar tetap *survive* dalam keadaan apapun. Manusia untuk mencapai maksudnya berperan secara kontinyu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan ekosistem setempat (Hardesty DL, 1977). Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, manusia yang dibesarkan dalam sebuah lingkungan tertentu, akan terus mengembangkan berbagai perangkat, sehingga mereka dapat mendayagunakan potensi alam di sekitarnya untuk kehidupan mereka yang layak. Interdependensi antara manusia dan lingkungan serta nilai budaya yang mereka anut, tidaklah sama dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sebagai contoh masyarakat perambah hutan yang terbiasa hidup dan bergantung kepada hasil hutan dan kondisi geografis, iklim dan tanah selama beberapa generasi. Kelompok masyarakat ini dari sudut pandang *outsiders* dinilai sebagai

kelompok masyarakat dengan pola kebudayaan (*cultural pattern*) yang rendah. Alasannya, terdapat pemahaman bahwa nilai budaya sebuah kelompok manusia ikut mendorong dan mempengaruhi tingkah laku warganya. Salah satu tindakan yang keliru dimengerti oleh orang dari luar komunitas perambah hutan, bila mereka membuat sebuah penilaian negatif tentang tindakan mengumpulkan hasil hutan dan membuka lahan pertanian di wilayah hutan tertentu identik dengan pelanggaran terhadap pranata hukum nasional yang berlaku, serta bukti dari masyarakat yang memiliki nilai budaya destruktif. Dengan kata lain, tindakan merambah hutan identik dengan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai positif (Vayda, 1981). Karena kesalahan pemahaman ini, terjadi salah penilaian terhadap status perambah hutan dan aktivitas-aktivitas mereka. Perambah hutan dituduh sebagai pelaku terjadinya erosi dan hancurnya hutan lindung (Dove, 1983).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dengan waktu pengumpulan data survei selama 3 minggu sejak tanggal 16 November - 7 Desember 2009 yang dilakukan di Desa Tirom Kecamatan Pematang Sawa



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Tanggamus Lampung dimana lokasi tersebut merupakan wilayah perbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bagian Selatan (lihat Gambar 1).

Jenis data dan metode analisis

Jenis data dari penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara (*interview*) mendalam dan kuesioner pada 60 responden perambah (*purposive sampling*). Data sekunder didapat dari sumber bacaan, hasil kajian sebelumnya, serta referensi lainnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosial dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Teknik kuantitatif dilakukan untuk menguji keterhubungan luas lahan perambahan dengan faktor kepemilikan lahan pribadi dan pendapatan rumah tangga. Dalam hal ini lahan perambahan sebagai *independent factor* dan luas lahan milik dan pendapatan responden sebagai *dependent factor*. Metode statistik menggunakan analisis regresi linier dengan multi variabel (*multiple*). Pengolahan data statistik menggunakan SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah masyarakat Desa Tirom

Penduduk asli Tirom berasal dari migrasi yang dilakukan beberapa kelompok keluarga saat dan pasca meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Mereka menetap untuk bertahan menjalani kehidupan kembali setelah seluruh materi dan sebagian anggota keluarganya 'hilang' karena musibah meletusnya gunung tersebut. Sekelompok orang ini memilih untuk menetap di pinggiran pantai di sekitar Tirom karena alasan kecukupan hidup. Hidup di sekitar pantai akan menyediakan kebutuhan protein yang cukup dari ikan yang akan mereka

tangkap. Mereka membangun rumah, bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar hutan Tirom. Pohon-pohon penghasil kayu mereka gunakan untuk membuat rumah dan perahu sampan untuk menangkap ikan. Kehidupan yang mereka jalani pada waktu itu sangat tradisional sekali.

Pada waktu itu, penduduk asli Tirom berkebun cengkeh dan dari hasil cengkeh inilah, masyarakat asli Tirom mulai membangun perekonomian mereka. Meskipun hasil panen cengkeh memiliki jangka waktu cukup lama (1 tahun sekali) namun penduduk asli ini bertahan untuk mengembangkannya karena harga cengkeh dan permintaan cengkeh cukup menjanjikan. Suksesnya Tirom sebagai penghasil cengkeh menjadi bahan pemikiran oleh orang-orang Semendo (sebagian masyarakat di Palembang yang telah terkenal sebagai ahli bercocok tanam dengan membuka lahan di hutan) sehingga pada waktu itu mulailah orang-orang Semendo melakukan survei ke daerah Tirom dan berniat untuk membuka hutan untuk dijadikan ladang cengkeh di daerah Tirom.

Awal masuknya orang Jawa

Ada 2 jalur masuknya orang Jawa di Tirom untuk pertama kalinya. Pertama mereka masuk ke daerah Tirom sebagai tenaga buruh/upah dari orang-orang Semendo yang membuka lahan di Tirom; yang kedua adalah mereka masuk sebagai tenaga upahan HPH PT. Suprahari yang memiliki lahan konsesi di Tirom. Kedatangan orang Semendo dengan membawa tenaga upah orang Jawa memiliki hubungan kuat dengan pola penggunaan lahan dan hasil tutupan hutan saat ini, karena menurut pengakuan masyarakat bahwa pada waktu itu terdapat konflik yang cukup serius antara penduduk asli Tirom dengan orang Semendo sebagai pendatang di daerah Tirom.

Awal kedatangan orang-orang Semendo di Tirom kurang lebih pada tahun 1978-an dan hal ini tidak mudah untuk orang-orang Semendo agar dapat diterima di Tirom oleh penduduk asli. Konflik antara orang-orang Semendo dengan penduduk asli awalnya dikarenakan mereka (orang Semendo) telah membuka lahan di hutan adat milik penduduk asli. Konflik ini berkepanjangan dan terjadi selama 1 tahun sampai akhirnya terjadilah negosiasi kesepakatan antara penduduk asli dan orang Semendo bahwa orang Semendo diperbolehkan membuka hutan di Tirom asalkan tidak di lahan adat/marga karena hutan Tirom masihlah luas jika masuk ke dalam jauh dari pesisir pantai. Artinya, orang Semendo diperbolehkan membuka lahan di Tirom tetapi hanya di hutan Suaka yang ditetapkan oleh Belanda tahun 30-an (saat ini statusnya adalah TNBBS). Orang Semendo menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan mereka mulai membuka lahan Suaka untuk dijadikan perkebunan cengkeh.

Pada tahun 1980 terjadi wabah penyakit yang menimpa tanaman cengkeh di seluruh wilayah Tirom. Wabah penyakit itu telah memporandakan tanaman cengkeh Tirom maka sebagian besar orang Semendo frustrasi atas kejadian ini dan akhirnya 90% dari mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Palembang. Orang-orang Jawa yang dimasa itu menjadi tenaga upah orang Semendo memutuskan untuk tetap tinggal di Tirom karena mereka memiliki peluang untuk menguasai lahan bekas majikannya dan mereka berpikir untuk mencoba mandiri menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan mengolah lahan bekas majikannya dengan jenis tanaman selain cengkeh. Dengan kejadian wabah penyakit yang menimpa tanaman cengkeh di Tirom seluruh masyarakat Tirom (penduduk asli, sisa orang Semendo, orang Jawa) mencoba beralih

komoditi dan mereka memutuskan untuk menanam kopi.

Pengusiran masyarakat Jawa

Pada tahun 1982 status kawasan Suaka mengalami perubahan status dari pemerintah. Status kawasan yang semula hutan lindung Bukit Barisan Selatan telah berubah menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan dari perubahan status ini terjadi juga perubahan pengelolaannya sehingga kawasan-nya menjadi daerah proteksi dari seluruh kegiatan manusia dalam bentuk apapun, terlebih lagi aktivitas budidaya pertanian dan perkebunan. Dari perubahan status ini terjadilah pengusiran besar-besaran pada masyarakat yang ada didalam kawasan Suaka/Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang sebagian besar telah dihuni oleh orang Jawa. Umumnya masyarakat yang diusir ini memilih untuk membeli lahan marga milik penduduk asli atau menjadi tenaga upah penggarap lahan marga milik penduduk asli dengan sistem paro tanah (membuka lahan dan mengolahnya dengan pembagian lahan setengah : setengah).

Kondisi sosial ekonomi Desa Tirom

Tingkat pendidikan masyarakat

Secara umum pendidikan kepala rumah tangga di Desa Tirom adalah SD dan hanya beberapa saja yang berpendidikan SLTP (jumlah kepala keluarga lihat Tabel 1), sedangkan pendidikan anak (generasi muda) rata-rata sampai dengan SD, beberapa SLTP, beberapa melanjutkan SMU, bahkan ada juga yang menyekolahkan mereka sampai tingkat perguruan tinggi tetapi proporsinya sangat kecil sekali (per dusun kurang lebih 1 kepala keluarga). Akan tetapi pada umumnya pendidikan generasi muda di Desa Tirom hanya tamat SD. Saat ini Desa Tirom belum memiliki SLTP maupun SMU sehingga untuk melanjutkan sekolah setelah tamat SD, mereka harus

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Tirom Pematang Sawa

No	Nama Dusun	Rukun Tetangga	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Dusun Simpang	RT 1	34
		RT 2	56
2.	Dusun Sinarjaya	RT 1	31
		RT 2	27
		RT 3	23
		RT 4	30
3.	Dusun Sugiwaras	RT 1	102
		RT 2	85
		RT 3	22
Total Kepala Keluarga			410

Data Primer, Desember 2009

merantau ke 'seberang' yang membutuhkan biaya sewa kos dan makan tersendiri.

Tingkat pendapatan masyarakat

Masyarakat Desa Tirom pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani (budidaya lahan maupun buruh tani), walaupun ada diantara mereka yang berprofesi sebagai nelayan (pencari ikan maupun tenaga jasa kendaraan air) tetapi mereka tetap memiliki kebun yang mereka budidayakan juga. Dari hasil pertanian ini, terdapat hasil pertanian yang mereka konsumsi sendiri (sayur-sayuran, buah-buahan), sedangkan hasil pertanian/perkebunan yang mereka jual adalah komoditas kopi, cengkeh dan coklat. Berdasarkan survei ini bahwa tingkat pendapatan masyarakat Tirom berkisar antara Rp. 200.000,- s.d Rp. 4.000.000,-. Perbedaan yang mencolok dari pendapatan ini salah satu penyebabnya adalah faktor kepemilikan lahan dan keberhasilan budidaya tanamannya (tanaman coklat). Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan masyarakat di Desa Tirom tidak merata yaitu 8,4% dari kepala keluarga memiliki pendapatan kotor > 3 juta per bulan, 21,6% kepala keluarga memiliki pendapatan 1 - 2 juta per bulan dan 70% dari mereka hanya memiliki pendapatan < 1 juta (lihat Tabel 2). Penyebab perbedaan pendapatan ini setelah ditelaah

disebabkan oleh 3 faktor, yaitu : faktor waktu tinggal (lamanya mereka menggarap lahan), faktor keterampilan budidaya, serta faktor luasan kepemilikan lahan marga (lahan milik pribadi).

Tindakan perambahan hutan

Perambahan kawasan TNBBS di Tirom dimulai saat meningkatnya jumlah kepala keluarga, disamping itu hasil panen andalan mereka (kopi) tidak lagi dapat diandalkan karena hasilnya makin lama makin sedikit dengan harga yang tidak menguntungkan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kekurangan pendapatan menjadi salah satu alasan mereka merambah kawasan TNBBS.

Pada umumnya mereka merambah hutan untuk ditanami padi huma (lihat Gambar 2) dimana hasil panen padi huma ini digunakan sebagai stok persediaan beras selama 1 tahun sehingga kebutuhan pokok selama 1 tahun sudah tercukupi dan tidak merasa khawatir untuk membeli beras saat keadaan ekonomi mereka minim yakni ketika pendapatan dari

Tabel 2. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga di Desa Tirom

No	Tingkat Pendapatan (per bulan)	Frekuensi (orang)	Persen (%)
1.	< 1 juta	42	70 %
2.	1 – 2 juta	13	21, 6%
3.	> 3 juta	5	8,4%

Berdasarkan hasil survei kepada 60 orang responden



Gambar 2. Areal rambahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk ditanami padi huma

Tabel 3. Luas Lahan Masyarakat di Desa Tirom

No	Nama Dusun	Lahan Ilegal		Lahan Pribadi	
1.	>1 ha	2	3,3%	7	11,7%
2.	0,5 - 1 ha	56	93,4%	24	40,0%
4	Tidak Memiliki Lahan	2	3,3%	29	48,3%

Berdasarkan hasil survei kepada 60 orang responden

Tabel 4. Luas Perambahan TNBBS di Desa Tirom

No	Nama Dusun	Jumlah KK yang merambah	Luas perambahan
1.	Dusun Simpang	55	57,5 Ha
2.	Dusun Sinarjaya	107	105,5 Ha
3.	Dusun Sugiwaras	180	183,0 Ha
Total Luas Perambahan			346 Ha

Data merupakan hasil pengakuan masyarakat (bukan pengukuran aktual di lapangan)

Tabel 5. Status Penggarap Lahan Perambahan di Desa Tirom

No	Status	Frekuensi (orang)	Persen (%)
1.	Penunggu	1	1,7 %
2.	Penggarap Penuh	54	90,0%
3.	Penggarap Upahan	2	3,3 %
4.	Penggarap Bagi Hasil	3	5,0%

Berdasarkan survei pada 60 orang responden (perambah)

hasil kopinya rendah. Menurut informasi dari responden bahwa Desa Tirom penduduknya pernah mengalami pailit sehingga harus mengkonsumsi

pisang dan umbi-umbian setiap hari sebagai makanan pokok. Ini terjadi ketika harga panen kopi rendah dan pada waktu itu mereka tidak memiliki komoditi pertanian yang dapat dijual secara rutin (pada waktu itu masyarakat belum mengenal coklat), sedangkan kopi dipanen 1 tahun sekali.

Dari catatan berdasarkan informasi masyarakat bahwa kejadian perambahan pasca pengusiran telah dimulai sejak 1990-an namun masih dalam jumlah yang kecil baik luasan maupun kepala keluarga. Perambahan kawasan TNBBS di Tirom mengalami puncaknya pada tahun 2007 karena permasalahan tata batas dan permasalahan ini belum terselesaikan sampai dengan sekarang. Saat ini, lebih dari 75% dari total kepala keluarga di Tirom telah memiliki lahan garapan di dalam kawasan TNBBS dengan kisaran luasan perambahan 0,5 - 3 ha tetapi pada umumnya mereka merambah seluas 1 ha untuk setiap kepala keluarga (lihat Tabel 3). Perambahan yang terjadi pada kawasan TNBBS di Desa Tirom menurut hasil survei kurang lebih seluas 346 Ha (lihat Tabel 4) dengan rata-rata setiap kepala keluarga merambah seluas 1 Ha (Tabel 5 menunjukkan status dalam menggarap lahan ilegal).

Masyarakat Desa Tirom menggantungkan sumber nafkahnya dari hasil budidaya kopi dan coklat. Selama ini budidaya kopi/coklat hanya dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan pupuk karena untuk pengolahan lahan secara intensif memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan pengakuan responden bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membeli pupuk dan obat-obatan pembasmi hama penyakit. Pola budidaya yang tradisional ini membuat hasil pertanian/perkebunan di Desa Tirom tidak maksimal sehingga mereka tidak dapat memberdayakan lahan seoptimal mungkin pada luasan lahan garapan yang sedikit.

Konflik tata batas

Perambahan hutan TNBBS di Desa Tirom telah terjadi cukup lama namun secara besar-besaran baru terjadi sekitar 2 tahun. Maksud dari 'besar-besaran' disini adalah hampir seluruh kepala keluarga di Desa Tirom melakukan perambahan kawasan kecuali penduduk pribumi yang secara geografis terletak paling jauh dari batas kawasan karena kebanyakan dari mereka tinggal di pinggir pantai.

Perambahan besar-besaran ini terjadi pasca kasus sengketa lahan di dalam kawasan dimana menurut mereka terjadi kekeliruan penetapan batas karena peta batas yang dimiliki TNBBS berbeda dengan peta yang dibuat oleh tim BPKH pada tahun 2005. Perbedaan yang mencolok pada batas terjadi di Dusun Sugiwaras, dimana dalam peta penetapan oleh TNBBS batas terluar kawasan adalah 1 km dari pinggir pantai, sedangkan pada peta yang dibuat tim BPKH batas terluarnya sejauh 3 km. Perbedaan ini terjadi karena ada kesalahan persepsi antara sungai way petar dengan way bokor. Menurut masyarakat, setelah mereka tahu bahwa terjadi 'kekeliruan' batas maka masyarakat Sugi Waras merasa leluasa menggarap lahan di kawasan TNBBS sampai dengan batas yang sesuai dengan tim BPKH. Hal ini diikuti pula

Tabel 6. Hasil *R Square* pada pengujian Hubungan Perambahan dengan Pendapatan dan Kepemilikan Lahan Pribadi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error
1	0,443	0,196	0,168	0,2140

oleh masyarakat Tirom dari dusun yang lainnya (Simpang dan Sinar jaya). Terdapat asumsi-asumsi dan pro-kontra tentang kasus ini akan tetapi sampai dengan sekarang belum menemui titik penyelesaian. Kedua belah pihak masih keras dengan pendiriannya. Karena tidak ada penyelesaian yang menguntungkan masyarakat, maka mereka merespon kasus ini dengan bersikap tetap menggarap lahan tersebut. Jika ada petugas mereka sembunyi, jika tidak ada petugas melanjutkan penggarapan. Masyarakat tahu petugas jarang ke lokasi sehingga masyarakat tidak takut menggarap lahan tersebut.

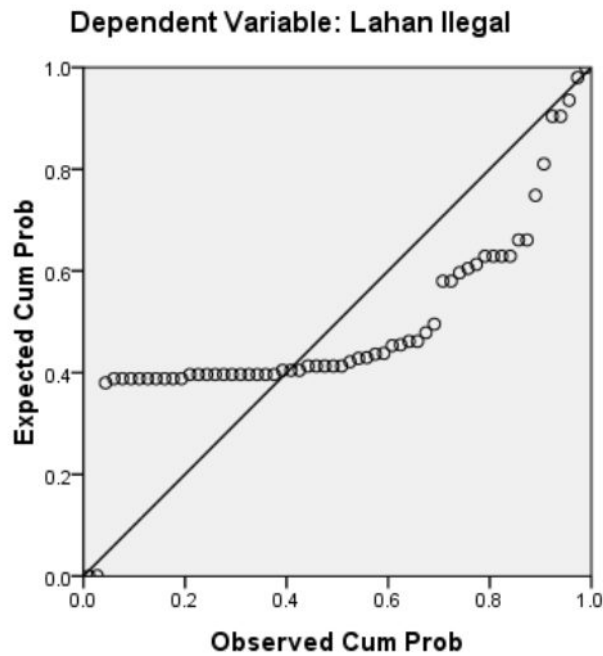
Hubungan pendapatan dan kepemilikan lahan terhadap tindakan perambahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 60 responden, masyarakat Desa Tirom memiliki sumber nafkah dari hasil pertanian, dan bentuk kerja lainnya (buruh, jasa angkut, dll.). Struktur pendapatan rumah tangga responden terlihat pada Tabel 2, sedangkan kepemilikan lahan pribadi responden dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, peneliti merumuskan penyebab-penyebab sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi tindakan perambahan hutan TNBBS. Namun dalam uji regresi menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi dari segi kepemilikan lahan dan pendapatan rumah tangga tidak mempengaruhi tindakan perambahan hutan. Dalam analisis multiple regresi, korelasi antara lahan legal dengan lahan ilegal adalah - 0,4, sedangkan korelasi antara lahan ilegal dengan

Tabel 7. Hasil Tingkat Keterhubungan antara Perambahan Hutan dengan Faktor Pendapatan dan Kepemilikan Lahan

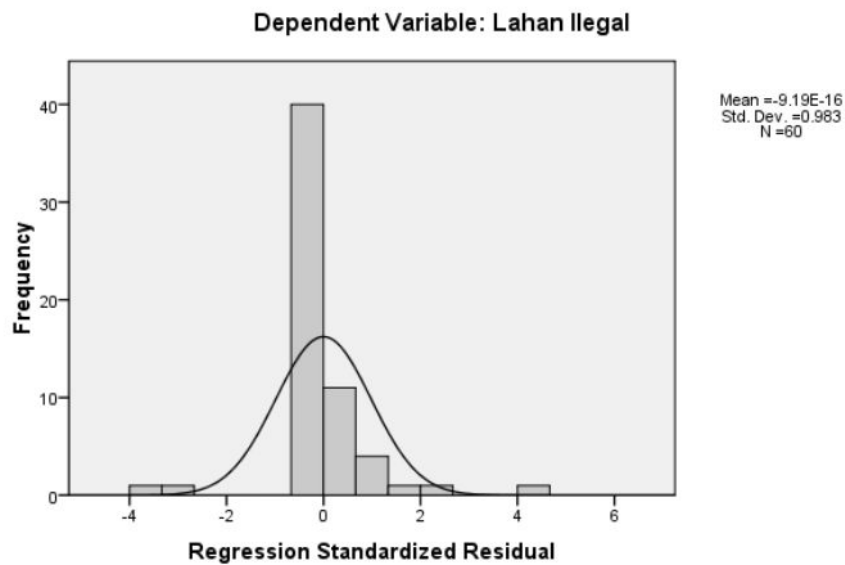
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significant
	B	Std Error	Beta		
Constant	1,093	0,039		27,736	0,000
Lahan Legal	-0,26	0,081	-0,076	- 0,325	0,746
Pendapatan	-9,107. 10 ⁻⁸	0,000	-0,375	- 1,600	0,115

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4. Grafik P-Plot Regresi Faktor Pendapatan dan Kepemilikan Lahan Legal terhadap Perambahan Hutan (lahan ilegal)

Histogram



Gambar 3. Grafik Historgam Faktor Pendapatan dan Kepemilikan Lahan Legal terhadap Perambahan Hutan (lahan ilegal)

pendapatan adalah - 0,441 dengan nilai *R square* sebesar 0,196. Dengan kata lain faktor pendapatan dan kepemilikan lahan hanya menyumbang 19,6% terhadap tindakan perambahan hutan (lihat Tabel 6). Faktor kepemilikan lahan pribadi dan pendapatan tidak berhubungan dengan faktor perambahan hutan atau H_0 ditolak berdasarkan nilai *t* pada lahan pribadi sebesar - 0,325 dengan $P > 0,01$ (nilai sig 0,746) dan nilai *t* pada pendapatan sebesar - 1,6 dengan $P > 0,01$ (nilai sig 0,115) (lihat Tabel 7).

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Tirom secara umum keadaannya miskin, ini terlihat dari distribusi tingkat pendapatan dimana sebanyak 70% memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000,-. Keadaan pendidikan masyarakat di Desa Tirom umumnya rendah, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya fasilitas dan sarana pendidikan untuk tingkat SLTP dan SMU. Faktor motivasi juga merupakan salah satu faktor penghambat pendidikan masyarakat Tirom. Umumnya generasi muda penduduk Tirom tidak mau melanjutkan pendidikan sampai dengan SLTP, bahkan ada beberapa dari mereka yang putus sekolah sejak sekolah dasar.

Masyarakat mengeluh faktor ekonomi sebagai pendorong tindakan perambahan hutan TNBBS. Faktor ekonomi tersebut tercermin pada pendapatan rumah tangga dan luasan kepemilikan lahan pribadi. Namun, berdasarkan analisis regresi bahwa perambahan hutan TNBBS tidak dipengaruhi faktor pendapatan rumah tangga dan luasan kepemilikan lahan pribadi dengan nilai *R square* 0,196. Dari hasil uji regresi ini menyimpulkan bahwa ada faktor lainnya (diluar faktor pendapatan dan kepemilikan lahan pribadi) yang mempengaruhi tindakan perambahan hutan.

Saran

1. Perlu adanya pembinaan kepada masyarakat Desa Tirom dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.
2. Perlu adanya upaya peningkatan keterampilan budidaya pertanian/ perkebunan agar lahan marga yang mereka miliki dapat optimal sebagai mata pencaharian utama.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindakan perambahan hutan TNBBS oleh masyarakat Desa Tirom.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1990. Undang-undang No 5/ 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta.
- Anonim. 1999. Undang-undang No 41/ 1999 tentang Kehutanan. Jakarta
- Anonim. 2008. Laporan Master Plan Penangan Perambahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, PT. Forindo Bangun Konsultan, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Departemen Kehutanan, Indonesia
- Baskerville GL. 1995. *The Forestry Problem: Adaptive Lurches Of Renewal, Barriers And Bridges To The Renewal Of Ecosystem And Institutions*. Columbia University Press, New York, pp. 37 - 102.
- Dove, Michael R. 1983. Theories of Swidden Agriculture or the Political Economy of Ignorance. *Agroforestry Systems*. pp 85-89.
- Hardesty DL. 1977. *Ecological Anthropology*. Wiley Publication. New York
- Hermawan T, Affianto A, Susanti A, Soraya E, Wardana W, Riyanto S. 2005. *Pemanfaatan Ruang dan Lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai; Suatu Rancangan Model*. Pustaka LATIN. Bogor. Indonesia
- Haryati, Susy. 2002. *Kaitan Karakteristik Rumah Tangga dan Peluang Perambahan Hutan di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*. Tesis Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Krathwoh I, David B. 1985. *Social and Behavioral Science Research*, JosseyBass Publ. London.

- Munggoro DW. 1999. Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Pengelolaan Kawasan Konservasi. In : K. Widodo and A. Aliadi (Editors), Pemberdayaan asset perekonomian rakyat melalui strategi kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Jember. Pustaka LATIN, Jember, Jawa Timur, Indonesia.
- Vayda AP. 1981. Research in East Kalimantan on Interactions Between People and Forests: A Preliminary Report. *Borneo Research Bulletin*. pp 3-15.
- Young, Pauline. 1982. *Scientific Social Survey and Research*. Prentice Hall of India Private limited, India.